

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu menyusun tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan melalui penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan melalui Penyesuaian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
6. Pejabat Fungsional Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
7. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan.

8. Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK adalah pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK dengan persyaratan tertentu bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
9. Kebutuhan Jabatan Fungsional APJK adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional APJK dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu instansi pusat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan instansi daerah.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh APJK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh APJK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian agar berjalan secara efektif, teratur, dan profesional.

Pasal 3

Lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK;
- b. tata cara Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK; dan
- c. pengangkatan.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian ditujukan bagi PNS yang telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional APJK jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

Pasal 5

- (1) Instansi Pengguna yang memiliki kebutuhan atas Jabatan Fungsional APJK, dapat mengusulkan PNS untuk mengikuti proses penyesuaian.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan, pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi yang ditentukan melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (3) Instansi Pengguna menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.

Pasal 6

Pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional APJK yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

- (1) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis perusahaan jasa kelautan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pengguna menyampaikan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Instansi Pembina.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

Pasal 8

Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK terdiri atas:

- a. pengusulan ditujukan kepada Instansi Pembina; dan
- b. seleksi administrasi dan portofolio.

Bagian Kesatu

Pengusulan kepada Instansi Pembina

Pasal 9

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian kepada PPK Instansi Pembina melalui PyB secara hirarki.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (5) Selain dilengkapi dengan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa:
 - a. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - c. surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - e. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
 - f. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang

pengusahaan jasa kelautan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;

- i. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional APJK;
 2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 3. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional APJK secara aktif.
- (6) Format surat persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf g, huruf h, dan huruf i dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Selain kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan dilengkapi dengan dokumen portofolio yang memuat hasil kerja, tulisan, publikasi, atau hasil kerja lain yang menunjukkan kinerja berdasarkan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

Bagian Kedua

Seleksi Administrasi dan Portofolio

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui Penyesuaian dilakukan dengan seleksi administrasi dan portofolio.
- (2) Seleksi administrasi dan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan seleksi administrasi dan portofolio, dengan susunan sebagai

berikut:

- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dengan jumlah ganjil.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur kepegawaian, dan paling sedikit 2 (dua) orang dari APJK atau pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja APJK.
 - (6) Tim Seleksi dapat melibatkan pihak di luar Instansi Pembina.
 - (7) Proses Seleksi administrasi dan portofolio oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.

Pasal 11

Tim Seleksi administrasi dan portofolio mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian yang diajukan oleh Instansi Pengguna;
- b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan dilakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian;
- c. memberikan penilaian dengan melakukan pemeringkatan terhadap kualifikasi kompetensi dan kinerja dari persyaratan administrasi dan portofolio; dan
- d. melaporkan seluruh proses tahapan seleksi administrasi dan portofolio terhadap PNS yang mengikuti penyesuaian Jabatan Fungsional APJK kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 12

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyampaikan hasil seleksi kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi jabatan fungsional.

- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Instansi Pembina kepada Instansi Pengguna yang memuat informasi sebagai berikut:
 - a. PNS dinyatakan lolos seleksi apabila memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio; atau
 - b. PNS dinyatakan tidak lolos seleksi apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan portofolio.
- (4) Terhadap PNS yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian.

BAB IV

PENENTUAN PEROLEHAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional APJK ditetapkan setelah PNS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan diberikan Angka Kredit sesuai dengan Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian Jabatan Fungsional APJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pendidikan, masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian Jabatan Fungsional APJK.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH

Pasal 14

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional

APJK melalui penyesuaian wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian dilaporkan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian dilaporkan oleh Instansi Pembina dalam bentuk rekapitulasi kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; dan
- b. Kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian negara.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian, mengalami:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. penyesuaian pendidikan; dan/atau
 - c. penambahan masa kerja.yang tidak mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan

namun mempengaruhi kenaikan angka kredit, dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sampai dengan batas waktu pelaksanaan penyesuaian.

- (2) Dalam hal PNS yang dinyatakan lolos seleksi sampai dengan periode pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian, mengalami kenaikan pangkat yang mempengaruhi kenaikan jenjang jabatan, tidak dapat melakukan permohonan penyesuaian rekomendasi pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan wajib mengikuti seleksi penyesuaian ulang.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti seleksi penyesuaian ulang dan tetap ingin diangkat ke dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian, rekomendasi yang diberikan menggunakan kepangkatan, pendidikan, atau masa kerja yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi penyesuaian yang pertama tetap berlaku dengan syarat kenaikan pangkat terbarunya dibatalkan terlebih dahulu dan dikembalikan ke pangkat sebelumnya.
- (4) Permohonan penyesuaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian dilaksanakan sampai dengan 13 Mei 2023.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR ...

Selanjutnya sebagai persyaratan, bersama ini kami lampirkan dokumen administrasi sebagai berikut :

1. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. salinan ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi;
6. salinan penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
7. daftar riwayat hidup;
8. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang perusahaan jasa kelautan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;
9. surat pernyataan yang menyatakan:
 1. bersedia diangkat menjadi Jabatan Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan;
 2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 3. kesediaan untuk melaksanakan kegiatan di bidang Jabatan Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan secara aktif.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi

(tanda tangan, stempel dinas)

Nama Jelas dan Gelar

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA
KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto
3 x 4

1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Pangkat/ Golongan Ruang	:	
4.	TMT pangkat	:	
5.	Tempat dan tanggal lahir	:	
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan *
7.	Instansi	:	
8.	Alamat rumah	:	
			Kode Pos:
9.	No. Telepon	:	Rumah: Kantor: HP:
10.	<i>E-mail</i>	:	

2. Pendidikan

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	JURUSAN/PROGRAM STUDI	TAHUN LULUS
1	2	3	4	5

3. Kursus/ Pelatihan di dalam dan di luar negeri

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN	TAHUN
1	2	3	4	5

4. Riwayat Jabatan Struktural

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

5. Riwayat Jabatan Fungsional

NO.	NAMA JABATAN	ESELON	NOMOR KEPUTUSAN	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6

6. Tanda Jasa/ Penghargaan

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR KEPUTUSAN	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1	2	3	4	5

7. Pengalaman kerja di bidang perusahaan jasa kelautan

NO.	PEKERJAAN/KEGIATAN BIDANG PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN	JABATAN	TAHUN
1	2	3	4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA
KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama
NIP
Jabatan Instansi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang/TMT Unit Kerja

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang perusahaan jasa kelautan selama (.....) tahun, sebagai berikut :

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional APJK	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
PyB

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA
KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam jabatan fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan;
2. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
3. bersedia untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengusahaan jasa kelautan secara aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA
KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat keterangan,
pimpinan unit kerja

NAMA JELAS DAN GELAR
NIP:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/ STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	3	18	28	38	47
		Magister	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	5	35	55	75	95
		Magister	6	36	56	76	96
		Doktor	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	5	35	55	75	95
		Magister	6	36	56	76	96
		Doktor	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	8	53	83	113	143
		Magister	9	54	84	114	144
		Doktor	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	8	53	83	113	143
		Magister	9	54	84	114	144
		Doktor	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	8	53	83	113	143
		Magister	9	54	84	114	144
		Doktor	11	56	86	116	146
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	10	70	110	150	190
		Magister	12	72	112	152	192
		Doktor	14	74	114	154	194
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	200	200	200	200	200

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA
KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN

FORMAT LAPORAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN MELALUI PENYESUAIAN OLEH INSTANSI
PENGGUNA KEPADA INSTANSI PEMBINA

No	Nama Lengkap	NIP	Nomor Karpeg	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	TMT Jabatan	Unit Kerja/Instansi	No. SK Pengangkatan	Ket

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO